

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM menjadi salah satu sektor yang penting bagi pembangunan ekonomi. Di Indonesia sendiri menurut Kadin.id menyebutkan bahwa jumlah UMKM pada tahun 2023 adalah sebanyak 66 juta hal ini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 65 juta. Tingginya jumlah UMKM di Indonesia menyebabkan UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang besar dan sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Daya serap tenaga kerja oleh UMKM mencapai angka 97% dengan kontribusinya terhadap PDB sebesar 61% atau setara dengan Rp 9.580 triliun rupiah. Peran UMKM yang sangat krusial menyebabkan UMKM selalu mendapat perhatian penuh dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah yang semakin gencar melakukan pemberdayaan dan pelatihan UMKM. Tujuannya adalah agar UMKM mampu berkembang dengan pesat dan mampu menjadi agen perubahan ekonomi nasional. Keikutsertaan pemerintah dalam proses pengembangan UMKM menandakan bahwa saat ini pemberdayaan terhadap UMKM sedang sangat gencar untuk dilakukan.

Segala hal tentang UMKM secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang termasuk pada pengertian dan kriteria UMKM. UMKM merujuk kepada usaha produktif yang dimiliki dan

dikelola oleh individu maupun entitas bisnis lainnya yang memenuhi syarat sebagai usaha mikro (Shaïd & Idris, 2023). UMKM diharapkan mampu terus meningkat eksistensinya sejalan dengan seluruh keunggulan yang dimilikinya. UMKM adalah usaha yang sifatnya sangat fleksibel dan adaptif (Hastuti et al., 2021). UMKM menjadi salah satu pilar ekonomi nasional, karena kontribusinya dalam peningkatan pendapatan nasional. UMKM disebut sebagai pilar vital perekonomian negara, karena tahan terhadap krisis dan menjadi fondasi pemulihan ekonomi pasca covid-19. Oleh karena hal itu pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM melalui berbagai macam program. Program tersebut diantaranya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi operasional UMKM baik dalam bentuk digital maupun fisik, mempermudah akses modal bagi para pelaku UMKM melalui pemberian program KUR dan pembiayaan *Ultra Micro, digitalisasi* terhadap UMKM, serta peningkatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan eksistensi dan pemberdayaan UMKM (Lasmi, 2023). Dengan dilakukannya program tersebut diharapkan UMKM di Indonesia mampu berkembang dan semakin tahan akan perubahan-perubahan yang terjadi serta diharapkan mampu mengikuti arus globalisasi yang pesat. Namun menurut data dari Badan Pusat Statistika, pada tahun 2023 sebanyak 68,05% UMKM mengalami kesulitan dalam rangka menjalankan usahanya termasuk dalam akses permodalan maupun pemasarannya.

Peningkatan jumlah UMKM yang semakin drastis dari hari ke hari menandakan bahwa pemerintah telah berhasil dalam melakukan pemberdayaan terhadap UMKM. Masing-masing daerah di Indonesia telah berhasil mengalami

peningkatan jumlah UMKM, salah satunya adalah provinsi Bali khususnya pada kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah UMKM yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di provinsi Bali. Menurut data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng terdapat peningkatan jumlah UMKM yang cukup signifikan yang didominasi oleh jenis usaha mikro.

Tabel 1.1
Jumlah UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Buleleng

No	Jenis Usaha	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Usaha Mikro	44.670	47.311	55.173	66.979
2	Usaha Kecil	9.576	9.654	10.827	11.781
3	Usaha Menengah	226	234	351	396
Jumlah UMKM		54.471	57.199	66.315	79.156

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Buleleng, 2024

Berdasarkan informasi pada tabel 1.1 kenaikan jumlah UMKM pada tahun 2023 cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2023 mencapai angka 12.841 UMKM, sementara di tahun 2022 hanya mencapai 9.116 UMKM. Dilihat dari data ini diperkirakan pada tahun 2024 jumlah UMKM di kabupaten Buleleng akan terus mengalami peningkatan jumlahnya. Dengan jumlah total UMKM di kabupaten Buleleng yang mencapai angka yang cukup signifikan tersebut juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai sektor baik perdagangan, industri, maupun jasa.

UMKM sektor usaha jasa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Kontribusi ini mendorong terjadinya peningkatan jumlah UMKM sektor jasa secara berkelanjutan. Pada tahap

awal pengembangan usaha di bidang jasa, pengeluaran untuk unit bisnis biasanya tidak memerlukan dana yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, diperlukan investasi yang lebih signifikan untuk meningkatkan kemampuan, baik dalam hal keahlian maupun penyedia komponen pendukung yang diperlukan untuk mengembangkan usaha (Putra et al., 2022). Berikut merupakan data jumlah UMKM sektor jasa di Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 hingga 2023.

Tabel 1.2
Perkembangan UMKM Sektor Jasa di Kabupaten Buleleng

No	Tahun	Jumlah
1	2020	2.853
2	2021	3.191
3	2022	6.450
4	2023	11.504
Total		23.998

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Buleleng, data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan informasi pada tabel 1.2, perkembangan UMKM sektor jasa di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan yang sangat pesat terutama pada tahun 2023. Peningkatan sebesar 5.054 unit usaha jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mengalami peningkatan sebesar 3.259 unit usaha. Peningkatan ini membuktikan bahwa UMKM sektor jasa mulai diminati oleh masyarakat sebagai pilihan untuk pengembangan usaha. UMKM sektor jasa tersebar di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Buleleng yang jumlahnya bervariasi.

Tabel 1.3
UMKM Sektor Jasa Se-Kecamatan di Kabupaten Buleleng

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Banjar	331
2.	Seririt	311
3.	Busungbiu	139

No	Kecamatan	Jumlah
4.	Buleleng	1556
5.	Gerokgak	763
6.	Kubutambahan	153
7.	Sawan	268
8.	Tejakula	242
9.	Sukasada	488

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kab. Buleleng, data diolah peneliti (2024)

Berdasarkan informasi pada tabel 1.3 tentang persebaran UMKM sektor jasa se-Kecamatan Buleleng menunjukkan bahwa persebaran UMKM sektor jasa di Kabupaten Buleleng tidak merata. Kecamatan Buleleng merupakan kecamatan dengan jumlah UMKM sektor jasa paling banyak diwilayah Kabupaten Buleleng yang terdiri dari berbagai sektor usaha. Persebaran jumlah UMKM selain mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah namun juga ikut menyumbangkan serangkaian masalah yang harus diatasi pemerintah maupun pelaku UMKM sendiri. Meningkatnya jumlah UMKM akan memberikan tantangan yang harus dihadapi para pelaku UMKM. Tantangan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber, baik itu yang berasal dari internal atau eksternalnya (Surya, 2021). Tantangan-tantangan yang sering dialami UMKM diantaranya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki UMKM kurang kompeten karena kurangnya pelatihan yang dilakukan pemilik, proses pemasaran UMKM yang masih sering mengalami kendala, pencatatan keuangan UMKM yang kurang mumpuni, aspek permodalan UMKM yang masih sulit, persaingan antar pelaku UMKM yang semakin ketat, pengelolaan keuangan usaha yang terbilang sulit, serta terkait legalitas usaha yang terbilang sulit (Hidayat et al., 2022). Maka dengan timbulnya tantangan tersebut para pelaku UMKM dituntut untuk semakin kreatif agar mampu bertahan di tengah persaingan yang sedang dihadapi. Tantangan ini akan

memberikan efek baik jangka panjang maupun jangka pendek bagi kelangsungan UMKM apabila tidak bisa diatasi dengan baik.

Tantangan yang harus dihadapi oleh pelaku usaha dalam hal ini para pelaku UMKM sangat berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangannya. Kinerja keuangan menjadi salah satu indikator keberhasilan bagi sebuah perusahaan. Kinerja keuangan dianggap sebagai sebuah cara untuk menilai keefektifan dan efisiensi perusahaan dalam rangka mencapai tujuannya berupa profit (Laila & Sihotang, 2022). Kinerja keuangan juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan penilaian terhadap kondisi keuangan dari perusahaan tersebut (Dewi & Basyir, 2023). Analisis terhadap kinerja keuangan sangat diperlukan oleh semua pihak, baik pihak internal maupun eksternal dari perusahaan (Rudiwantoro, 2020). Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan bisnis yang mulai memasuki era digital, kinerja keuangan yang baik sangat penting dimiliki oleh UMKM agar mampu tetap bertahan di tengah tingginya arus persaingan. Untuk itu, UMKM perlu melakukan identifikasi mengenai faktor-faktor yang dapat menghambat dan mendukung kinerja keuangan UMKM di masa yang akan datang (Martadinata & Pasek, 2024). Faktor penghambat tersebut harus mampu dihadapi para pelaku UMKM dengan strategi usaha yang baik agar nantinya mampu memberikan peningkatan terhadap profitnya.

Tabel 1.4
Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng

No	Aspek	Rata-rata Persentase
1	Penurunan penjualan	61%
2	Penurunan laba usaha	61%
3	Penurunan karyawan	22%
4	Permasalahan modal	Dialami oleh 71,4% UMKM

No	Aspek	Rata-rata Persentase
5	Penurunan kemampuan pembayaran angsuran bank	Dirasakan hampir 100% UMKM

Sumber: Balitbang Kab. Buleleng (2022)

Berdasarkan informasi pada tabel 1.4 tentang kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng menggambarkan bahwa sebagian besar UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan terhadap penjualan dan laba usaha yang diperoleh. Hal ini menjadi tugas besar bagi pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM secara maksimal dan lebih gencar lagi. Sementara itu sebesar 71,4 % UMKM di Kabupaten Buleleng mengalami permasalahan yang berkaitan dengan modal usaha dan hampir seluruh UMKM mengalami tantangan di bidang pembayaran angsuran bank atas pinjaman yang dilakukan. Permasalahan-permasalahan ini tentunya akan menyebabkan UMKM mengalami hambatan apabila tidak diatasi dengan baik. Permasalahan-permasalahan yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Buleleng masih terus berlanjut hingga saat ini. Hal ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistika mengenai kinerja UMKM di provinsi Bali.

Tabel 1.5
Performa Kinerja UMKM di Provinsi Bali

No	Kabupaten/Kota	Performa Kinerja Lebih Buruk (UMKM) Tahun 2023	Persentase Performa Usaha
1	Buleleng	5.231	20,79%
2	Denpasar	4.308	17,12%
3	Gianyar	4.249	16,88%
4	Badung	3.594	14,28%
5	Tabanan	2.511	9,98%
6	Jembrana	2.370	9,42%
7	Bangli	1.222	4,86%
8	Karangasem	1.067	4,24%
9	Klungkung	614	2,44%
Total		25.166	100%

Sumber: Badan Pusat Statistika (2023)

Berdasarkan informasi pada tabel 1.5 mengenai performa kinerja UMKM di Provinsi Bali, UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki kinerja yang buruk yaitu sebanyak 20,79% atau sebanyak 5.231 UMKM. Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Bali, UMKM di Kabupaten Buleleng masih tergolong berada pada kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Menurut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buleleng masalah yang dihadapi UMKM cukup kompleks. Salah satu yang paling sering ditemui pada UMKM adalah terkait keuangan UMKM. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh UMKM akan memberikan akibat terhadap kinerja keuangan UMKM secara keseluruhan. UMKM cenderung mengalami kesulitan dalam pengelolaan keuangan usahanya. Penurunan keuntungan, persaingan usaha, permasalahan pemasaran, akses modal, dan pengelolaan keuangan usaha menjadi masalah yang paling sulit diatasi oleh UMKM.

Menurut Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, beberapa pelaku UMKM juga mengemukakan bahwasanya keuangan UMKM sifatnya sangatlah sensitif dan rawan mengalami kenaikan maupun penurunan. Ketidakpastian keuntungan yang diperoleh UMKM menyebabkan pelaku UMKM harus mampu mempersiapkan strategi agar kelangsungan usaha mereka terjaga. Penurunan keuangan yang paling terasa menurut para pelaku UMKM adalah pada saat terjadinya pandemi covid 19 dan pasca pandemi covid 19 yang menyebabkan perekonomian belum pulih sepenuhnya. Saat ini pelaku UMKM masih terus berusaha untuk mempertahankan keuangan usahanya agar berada pada batas normal dan tidak mengalami kerugian. Permodalan juga merupakan salah indikator kinerja keuangan UMKM yang cukup penting bagi para

pelaku UMKM. Banyak pelaku UMKM yang memutuskan untuk melakukan pinjaman modal dalam rangka mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik.

Banyak kesulitan yang kemudian akan muncul ketika UMKM tidak mampu melakukan pengelolaan keuangannya dengan baik, yang pada akhirnya hal tersebut akan berakibat pada profitabilitas UMKM yang akan mengalami penurunan. Bahkan di era modern yang telah maju ini banyak faktor yang seharusnya memudahkan UMKM dalam mencapai keunggulan kompetitifnya namun malah sebaliknya menghambat kemajuan usaha. Saat ini, perkembangan ekonomi sudah memasuki era ekonomi digital yang ditandai dengan banyak unit bisnis yang mulai beralih dari sistem konvensional ke modern seperti teknologi untuk menjalankan bisnis (Musmini et al., 2022). Kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mampu membantu UMKM dalam memajukan usahanya. Pelaku UMKM saat ini juga dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi yang ada khususnya di bidang keuangan atau *financial* dalam menjalankan usahanya. Perkembangan *financial technology* sangat pesat akhir-akhir ini, tidak hanya di negara maju namun juga di negara berkembang seperti Indonesia. *Financial technology (fintech)* merupakan teknologi yang digunakan dalam mendukung layanan perbankan dan keuangan (Herawati et al., 2020). Salah satu contoh *financial technology* yang sering ditemui adalah penggunaan sistem pembayaran yang beralih dari sistem konvensional menjadi sistem modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada atau dikenal dengan istilah *e-payment*. Keberadaan *e-payment* saat ini sangat mendukung perkembangan UMKM untuk memasuki era bisnis digital, sehingga ikut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Yuniarta & Purnamawati, 2021).

E-payment atau dikenal dengan istilah pembayaran non tunai merupakan sebuah sistem pembayaran yang digunakan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi yang dilakukan secara online (Houston, 2019). *E-payment* memiliki beragam bentuk dan jenis dengan keunggulan masing-masing yang dapat digunakan oleh para konsumen sesuai dengan kebutuhannya. *E-wallet* (OVO, Shopeepay, Go-Pay, Dana), Qris (*Quick Response Code Indonesia Standard*), *m-banking*, dan kartu kredit adalah jenis *e-payment* yang populer dan sering ditemui di masyarakat Indonesia. Penggunaan *e-payment* diharapkan dapat membawa perubahan bagi UMKM dalam rangka meningkatkan proses bisnisnya yang mulai memasuki lingkungan bisnis digital (Kilay et al., 2022). Kegiatan ekonomi yang didukung dengan penggunaan teknologi seperti *e-payment* akan memberikan manfaat berupa tingkat efisiensi pelaksanaan ekonomi yang meningkat serta memberikan kemudahan dalam bertransaksi (Ulansari & Yudiantara, 2021).

Fakta di lapangan menunjukkan bahwasanya ketika UMKM mampu menggunakan *e-payment* dengan optimal maka akan terjadi peningkatan terkait pendapatan yang diterima. Hal ini dikarenakan kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh sistem pembayaran ini baik bagi pelaku usaha maupun bagi konsumen yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan penjualan yang efisien. Dari sudut pandang konsumen kemudahan yang ditawarkan akan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan meningkatnya kepuasan pelanggan maka akan memberikan kenyamanan bagi konsumen yang berpotensi juga meningkatkan penjualan UMKM. Sementara itu, dari sudut pandang pelaku usaha, *e-payment* dapat membantu mengurangi risiko kerugian yang berpotensi timbul akibat kesalahan dalam melakukan perhitungan dan mampu memberikan

pencatatan atas pendapatan dengan akurat. Pelaku usaha yang mampu mengadopsi sistem pembayaran ini dapat menjangkau wilayah transaksi yang lebih luas termasuk ke wilayah lain yang sebelumnya sulit dilakukan dikarenakan sistem pembayaran konvensional yang sebelumnya diterapkan.

Perkembangan sistem *e-payment* yang semakin cepat dari hari ke hari salah satunya disebabkan oleh tren *cashless* yang mulai menjadi gaya hidup bagi kalangan masyarakat tertentu utamanya ditemukan di generasi muda. Meningkatnya tren *cashless* menyebabkan terjadinya perubahan terhadap sistem pembayaran serta perkembangan bisnis digital yang berpotensi meningkatkan kinerja keuangan bisnis (Kustina & Aji, 2023). Kepraktisan dan kenyamanan yang ditawarkan dalam sistem pembayaran ini juga merupakan alasan mengapa *e-payment* semakin berkembang saat ini. Namun dibalik hal tersebut, pada kenyataannya masih banyak masyarakat utama para pelaku bisnis yang belum mampu menggunakan sistem pembayaran ini dalam unit bisnisnya. Pada tahun 2023 menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS) jumlah UMKM yang telah menggunakan internet dalam pengelolaan bisnisnya hanya sebanyak 36,81%.

Faktor yang menyebabkan mengapa *e-payment* belum bisa diimplementasikan oleh seluruh pelaku bisnis adalah minimnya informasi yang diperoleh oleh para pelaku bisnis mengenai pentingnya penggunaan teknologi dalam hal ini *e-payment* dinilai menyebabkan mengapa adaptasi teknologi ini di bidang bisnis sangat sulit untuk dilakukan (Purnamawati & Yuniarta, 2021). Selanjutnya, kekhawatiran akan tingkat keamanan sistem pembayaran ini, hal ini disebabkan karena maraknya kejahatan di internet yang semakin meningkatkan kekhawatiran bagi para pelaku bisnis utamanya para pelaku bisnis skala kecil.

Selain itu, akses internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia juga merupakan salah satu alasan mengapa sistem pembayaran digital belum mampu diterapkan sepenuhnya.

Telah banyak penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengkaji apakah terdapat pengaruh pada kinerja keuangan ketika unit usaha bisnis menerapkan pembayaran *e-payment* terhadap unit bisnisnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, (2023) yang melakukan penelitian terhadap bagaimana pengaruh akses permodalan, *e-payment*, dan *e-commerce* terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Buleleng, yang memperoleh hasil bahwa variabel *e-payment* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di kecamatan Buleleng. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al., (2020) memperoleh hasil bahwa adanya pengaruh *e-payment gateway* terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Palembang. Menurut Sundari (2024) menyatakan bahwa *e-payment* dengan perspektif *technology acceptance model* (TAM) memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada UMKM di Kota Tanjungpinang baik itu secara parsial maupun secara simultan. Menurut Abidin (2024) menyatakan bahwa *digital payment* secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja pelaku UMKM di Parepare. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Paripurna & Ajija (2019) memperoleh hasil yang berbeda yaitu tidak terdapat pengaruh antara *payment gate away* terhadap pendapatan UMK di Surabaya. Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Candra & Pabulo (2021) bahwa tidak terdapat pengaruh antara *e-payment* dengan kinerja UMKM secara menyeluruh.

Serangkaian kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu, salah satunya adalah memperoleh laba. Pemilik usaha akan selalu berusaha untuk memperoleh laba semaksimal mungkin dengan pengorbanan yang minimal. Laba merupakan tujuan mutlak dari sebuah bisnis. Dalam proses memaksimalkan laba yang ingin diperoleh, pelaku bisnis akan melakukan berbagai cara. Salah satu cara yang sapat dilakukan dalam rangka memaksimalkan perolehan laba sebuah usaha adalah dengan melakukan pengendalian biaya. Pengendalian biaya merupakan aspek internal bisnis yang mampu dikendalikan secara penuh oleh pemilik bisnis. Pengendalian biaya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja bisnis serta untuk mencegah timbulnya pemborosan biaya yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kesalahan dalam kegiatan operasional bisnis (Putri, 2022). Setiap unit bisnis memerlukan adanya pengendalian biaya dalam setiap aktivitas produksinya.

Pengendalian biaya didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memantau dan menilai kesesuaian antara realisasi dan anggaran biaya yang timbul dalam sebuah bisnis secara kontinu agar semua unsur dalam bisnis berfungsi sebagai mana mestinya sehingga tujuan bisnis nanti mampu dicapai dengan baik (Dwi & Desipradani, 2021). Pengendalian biaya juga dilakukan sebagai dasar untuk melakukan pengambilan keputusan dalam sebuah unit bisnis yang dapat dilakukan dengan melakukan perencanaan, pencatatan atas pengeluaran dan pemasukan, penggolongan biaya, serta pelaporan terhadap biaya secara sistematis dan terperinci (Safkaur, 2021).

Pengendalian biaya pada unit bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai jenis biaya yang diperlukan

oleh unit bisnis. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pemilik dalam melakukan alokasi sumber daya secara lebih terperinci dan efektif. Dengan adanya alokasi biaya, biaya-biaya yang tidak mendukung proses produktivitas dan pengembangan usaha akan dapat diidentifikasi untuk selanjutnya mampu diminimalisir. Langkah ini tentu mampu mencegah timbulnya pemborosan biaya untuk aktivitas yang tidak efektif yang berpotensi menyebabkan kerugian pada unit bisnis. Biaya tersebut nantinya akan dialokasikan kepada aktivitas yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan sehingga harapannya keuntungan juga akan mengalami peningkatan. Namun pada kenyataannya banyak unit bisnis yang belum mampu melakukan pengendalian atas biayanya. Padahal apabila unit bisnis mampu melakukan pengendalian biaya, maka dalam jangka panjang akan mampu meningkatkan daya saing usaha. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar manajemen keuangan yaitu prinsip profitabilitas yang mengemukakan bahwa memperoleh keuntungan yang maksimal atas pengendalian biaya yang efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2022) memperoleh hasil bahwa perencanaan keuangan yang matang sangatlah berpengaruh terhadap penghematan biaya sehingga mampu meningkatkan laba yang merupakan bagian dari kinerja keuangan dari UMKM. Selaras dengan pendapat tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Dayanthi (2024) memperoleh hasil bahwa pengendalian biaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Buleleng. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) mengemukakan bahwa dengan pengendalian biaya yang efektif dan efisien dapat dilakukan dengan penentuan biaya standar, yang pada akhirnya apabila dilakukan dengan baik mampu menguntungkan perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut,

penelitian yang dilakukan oleh Wiranata & Werastuti (2023) menyatakan bahwa pengendalian biaya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan UMKM di Kecamatan Buleleng, yang artinya ketika pengendalian biaya dilakukan dengan baik maka akan memberikan dampak yang baik pula terhadap kinerja keuangannya. Berbeda dengan pendapat peneliti sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Tahulending & Rondonuwu (2022) memperoleh hasil bahwasanya pengendalian biaya tidak berpengaruh secara efisien dalam meningkatkan laba usaha CV. Kombos Tendean.

Persaingan menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi UMKM dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya. Semakin meningkatnya jumlah UMKM dari tahun ke tahun selain memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara, namun peningkatan jumlah UMKM ini akan meningkatkan persaingan yang ada antar UMKM. Dilihat dari jumlah UMKM di Kecamatan Buleleng yang sangat tinggi mengakibatkan persaingan yang juga semakin ketat dialami oleh para pelaku UMKM. Persaingan pada usaha sejenis kerap ditemui di lapangan, bahkan tidak jarang terdapat pesaing yang meniru secara keseluruhan usaha tersebut. Setiap UMKM harus siap dengan persaingan yang tercipta. Dari hari ke hari persaingan antara usaha sejenis akan semakin ketat. Semakin banyak usaha yang menjual produk sejenis maka persaingan juga akan mengalami peningkatan. Tidak hanya itu semakin banyaknya UMKM yang menempati sebuah wilayah maka persaingan usahanya juga akan semakin meningkat (Aziz, 2023).

Tingginya tingkat persaingan pada UMKM di Kecamatan Buleleng yang menyebabkan penurunan pendapatan UMKM, hal ini dikarenakan konsumen yang memiliki lebih banyak pilihan produk sehingga mampu menurunkan loyalitasnya

terhadap satu unit bisnis. Keadaan ini akan memaksa para pelaku UMKM untuk berkompetisi baik itu dari segi harga, kualitas, layanan, maupun strategi pemasarannya. Tingginya tingkat persaingan juga akan menciptakan banyaknya kompetitor, sehingga pangsa pasar UMKM akan mengalami penurunan yang pada akhirnya akan berakibat pada penurunan keuntungan. Secara teori ketika jumlah pesaing terus mengalami peningkatan maka tingkat keuntungan akan mengalami penurunan secara keseluruhan. Keadaan ini dikenal dengan kompetisi sempurna dalam teori ekonomi.

Pesaing menjadi salah satu faktor yang mengancam keberlangsungan usaha (Dzulfikar et al., 2023). Persaingan dalam usaha harus mampu dihadapi dengan baik oleh pelaku usaha. Apabila pelaku usaha mampu menghadapi persaingan yang terjadi dengan baik maka usaha tersebut akan mampu berjalan dengan baik dalam jangka waktu yang panjang. Persaingan ini juga dapat dijadikan sebagai motivasi bagi perusahaan untuk menyusun strategi yang sekiranya mampu membawa dampak yang baik bagi kelangsungan usaha. Namun strategi ini juga harus disesuaikan kembali dengan keadaan yang terjadi di lapangan, tujuannya agar strategi ini tidak malah menimbulkan *strategy trap* yang nantinya justru memberikan kerugian bagi usaha tersebut.

Persaingan memang mampu mengancam keberlangsungan usaha apabila pemilik tidak mampu menghadapinya dengan baik, namun apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda persaingan justru mampu memberikan dampak yang positif bagi perusahaan. Persaingan mampu meningkatkan kreatifitas para pelaku usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mengatasi persaingan yang ada (Mardhiyah & Safrin, 2021). Persaingan juga mampu

mendorong para pelaku usaha untuk melakukan *diferensiasi* terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. *Diferensiasi* dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pembeda maupun ciri khas terhadap produk atau jasanya sehingga tidak mudah untuk ditiru. Jadi daripada dilihat secara satu sisi saja akan lebih baik apabila persaingan mampu dilihat dari sudut pandang yang lebih positif. Dengan adanya persaingan perusahaan mampu merumuskan strategi yang sesuai dan mampu membawa dampak yang positif bagi kelangsungan perusahaan.

Persaingan jelas akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kelangsungan usaha bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Mu'ah (2019) memperoleh hasil bahwa keunggulan bersaing mampu meningkatkan kinerja keuangan UKM. Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Arafat (2020) memperoleh hasil bahwasanya tingkat persaingan atau daya saing usaha berpengaruh terhadap perolehan laba yang akan meningkatkan kinerja keuangan pada Usaha Tahu di Kecamatan Sukamaju. Selanjutnya menurut Pramesti (2020) bahwasanya tekanan persaingan yang ada memberikan pengaruh secara positif terhadap kinerja bisnis UMKM di Jawa Timur.

Berdasarkan pemaparan diatas terkait kinerja keuangan UMKM, kebaruan dari penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada variabel penelitian. Peneliti mengkombinasikan tiga variabel sekaligus untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja keuangan UMKM, yaitu variabel *e-payment*, pengendalian biaya, dan tingkat persaingan. Variabel tingkat persaingan menjadi kebaruan dalam penelitian ini. Hal ini karena biasanya pada penelitian yang meneliti mengenai kinerja keuangan sebuah unit bisnis hanya berfokus pada unsur-unsur internal yang dapat dikendalikan oleh pemilik. Maka

daripada itu, peneliti menggunakan variabel tingkat persaingan yang merupakan unsur eksternal yang sulit dikendalikan pemilik bisnis. Variabel tingkat persaingan memiliki potensi untuk mempengaruhi kinerja keuangan dari sebuah unit bisnis, karena ketika tingkat persaingan usaha di sebuah daerah meningkat maka berpotensi untuk mempengaruhi kinerja keuangannya. Selain itu, subjek yang dijadikan penelitian oleh peneliti adalah lebih berfokus pada UMKM sektor jasa yang ada di Kecamatan Buleleng dikarenakan UMKM sektor jasa yang terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan UMKM dengan judul **“Pengaruh Penggunaan *E-Payment*, Pengendalian Biaya, dan Tingkat Persaingan terhadap Kinerja Keuangan UMKM Sektor Jasa di Kecamatan Buleleng”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi peneliti pada penelitian ini yaitu:

1. Pelaku usaha UMKM mengalami kesulitan akses permodalan dalam rangka pengembangan usaha dan pendapatan yang diperoleh mengalami fluktuasi yang pada akhirnya berakibat terhadap kinerja keuangan UMKM.
2. Pelaku usaha UMKM yang belum sepenuhnya beralih ke sistem pembayaran modern yaitu *e-payment* sementara saat ini *cashless* sudah mulai menjadi gaya hidup. Dimana salah satu sarana yang paling diperlukan adalah alat transaksi elektronik seperti *e-payment* ini.
3. Para pelaku usaha UMKM yang masih asing dengan istilah pengendalian biaya dan belum mampu optimal menerapkan pengendalian biaya dalam

unit bisnisnya, padahal pengendalian biaya sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha.

4. Semakin meningkatnya persaingan usaha sejenis yang ditemukan di sebuah wilayah menyebabkan para pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan. Para pelaku UMKM harus mampu menyusun strategi usaha yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan tujuan agar penelitian ini hanya fokus terhadap pengaruh penggunaan *e-payment*, *pengendalian biaya*, dan tingkat persaingan terhadap kinerja keuangan pada UMKM. Pembatasan juga dilakukan terhadap ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus terhadap UMKM terutama sektor jasa yang berada di Kecamatan Buleleng sebagai subjek penelitian ini.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penggunaan *e-payment* berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM sektor jasa di Kecamatan Buleleng?
2. Apakah pengendalian biaya berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM sektor jasa di Kecamatan Buleleng?
3. Apakah tingkat persaingan berpengaruh terhadap kinerja keuangan UMKM sektor jasa di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-payment* terhadap kinerja keuangan UMKM sektor jasa di Kecamatan Buleleng
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian biaya terhadap kinerja keuangan UMKM sektor jasa di Kecamatan Buleleng
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat persaingan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor jasa di Kecamatan Buleleng

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi tambahan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
 - b. Sebagai sumber pustaka tambahan bagi seluruh pihak yang ingin mengetahui bagaimana pengaruh dari penggunaan *e-payment*, pengendalian biaya, dan tingkat persaingan terhadap kinerja keuangan UMKM sektor jasa di Kecamatan Buleleng.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi para pelaku UMKM untuk merumuskan strategi bisnis di masa yang akan datang guna meningkatkan kinerja usahanya berkaitan dengan penggunaan *e-payment*, pengendalian biaya, dan tingkat persaingan.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber kepustakaan bagi Universitas Pendidikan Ganesha.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi tambahan bagi peneliti yang ingin melakukan kajian terhadap topik yang serupa yaitu pengaruh penggunaan *e-payment*, pengendalian biaya, dan tingkat persaingan terhadap kinerja keuangan terutama UMKM sektor jasa yang berada di Kecamatan Buleleng.

